



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISHAR MASIALA
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
3. NHK : 793839

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.495.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 15 m2/20 m2 di KAB / KOTA MUNA,

HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/50 m2 di KAB / KOTA MUNA

BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 18 m2/55 m2 di KAB / KOTA MUNA

BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

4. Bangunan Seluas 54 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL
SENDIRI Rp. 300.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 5 m2/20 m2 di KAB / KOTA MUNA,
HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

6. Bangunan Seluas 20 m2 di KAB / KOTA MUNA, HASIL SENDIRI
Rp. 250.000.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/80 m2 di KAB / KOTA MUNA
BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/80 m2 di KAB / KOTA MUNA,
HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

9. Tanah dan Bangunan Seluas 648 m2/10 m2 di KAB / KOTA MUNA,
HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 683 m2/300 m2 di KAB / KOTA
MUNA, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	185.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AGYA 10 G M/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI		
Rp. 105.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA NEW AVANZA 1.5G M/T Tahun 2012,		
HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	230.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	55.389.100
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.966.189.100
III. HUTANG	Rp.	110.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.856.189.100

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.